

**PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KELUARGA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM: ANALISIS PERATURAN
KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA**

* Muhammad Husni Abdulah Pakarti¹, Diana Farid², Iffah Fathiah³, Hendriana⁴
Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia^{1,3,4}
STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut, Indonesia²

* Corresponding author Email: husnipakarti@umbandung.ac.id

Abstract

The family is the smallest unit in society that has an important role in the formation of social structures. The government as a community regulator plays a role in regulating policies related to the family. One policy that has a significant influence on families is family planning policy. This policy aims to control population growth and improve the quality of life of families. From a legal perspective, family planning policies have complex impacts and need to be analyzed in depth. The purpose of this research is to analyze the influence of family planning policies on families from a legal perspective. The method used is a literature study by collecting data from various sources such as laws and regulations, scientific literature, and related government policies. The analysis was carried out by considering legal aspects related to family planning policies, including regulations, human rights, and family protection. The results of the analysis show that family planning policies have a significant impact on families from a legal perspective. On the one hand, this policy provides benefits such as access to better reproductive health information and services, controlling the number of children, and increasing family welfare. On the other hand, there are several legal issues that arise, such as violations of human rights, gender discrimination, and excessive government intervention in family private life. Family planning policy regulations need to be analyzed carefully to ensure that they are in line with legal principles and human rights. A balance is needed between the state's interest in regulating the population and the rights of families to make decisions about their own bodies. Policies that respect human rights, gender equality, and protect family privacy will have a positive impact in the long run.

Keywords: Family Planning Policy, Government Influence, Legal Perspective.

Abstrak

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembentukan struktur sosial. Pemerintah sebagai regulator masyarakat berperan dalam mengatur kebijakan yang berkaitan dengan keluarga. Salah satu kebijakan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keluarga adalah kebijakan keluarga berencana. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan populasi dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dalam perspektif hukum, kebijakan keluarga berencana memiliki dampak yang kompleks dan perlu dianalisis secara mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan keluarga berencana terhadap keluarga dalam perspektif hukum. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan kebijakan pemerintah terkait. Analisis dilakukan

dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang terkait dengan kebijakan keluarga berencana, termasuk peraturan, hak asasi manusia, dan perlindungan keluarga. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan keluarga berencana memiliki dampak yang signifikan terhadap keluarga dalam perspektif hukum. Di satu sisi, kebijakan ini memberikan manfaat seperti akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik, pengendalian jumlah anak, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, terdapat beberapa isu hukum yang muncul, seperti pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi gender, dan intervensi pemerintah yang berlebihan dalam kehidupan pribadi keluarga. Peraturan kebijakan keluarga berencana perlu dianalisis dengan cermat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Diperlukan keseimbangan antara kepentingan negara dalam mengatur populasi dan hak-hak keluarga untuk membuat keputusan mengenai tubuh mereka sendiri. Kebijakan yang menghormati hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan menjaga privasi keluarga akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

Kata Kunci: *Kebijakan Keluarga Berencana, Pengaruh Pemerintah, Perspektif Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembentukan dan perkembangan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga. Salah satu kebijakan yang berpengaruh dalam konteks ini adalah kebijakan keluarga berencana.

Peraturan kebijakan keluarga berencana adalah upaya pemerintah dalam mengatur pertumbuhan penduduk dengan cara mempengaruhi keputusan keluarga dalam merencanakan jumlah anak yang akan mereka miliki. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.¹

Pada penelitian ini, akan dianalisis pengaruh kebijakan keluarga berencana terhadap keluarga dalam perspektif hukum. Analisis ini penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan memberikan dampak yang positif bagi keluarga. Dalam analisis ini, akan

¹ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

diperhatikan aspek-aspek hukum yang terkait, seperti hak asasi manusia, kebebasan berkeluarga, serta peran dan kewajiban pemerintah dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam melaksanakan kebijakan keluarga berencana, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang akses terhadap informasi, metode kontrasepsi, dan pengaturan kehamilan.² Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi keluarga dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan perencanaan keluarga. Namun, dalam menerapkan kebijakan ini, pemerintah perlu memastikan bahwa hak-hak asasi keluarga dijamin dan prinsip-prinsip keadilan terpenuhi.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah hak asasi manusia. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki hak untuk bebas menentukan jumlah anak yang mereka inginkan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) Konvensi Internasional³ tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang menyatakan bahwa "Tidak ada campur tangan dari pihak publik dalam urusan pribadi dan keluarga, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh hukum dan diperlukan dalam kepentingan umum."⁴

Namun, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melindungi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks kebijakan keluarga berencana, pemerintah perlu memastikan bahwa akses terhadap informasi dan metode kontrasepsi tersedia secara merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Keterjangkauan dan kesetaraan akses terhadap layanan kesehatan

² Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Keluarga Berencana.

³ United Nations Population Fund (UNFPA). (2020). *State of World Population 2020: Against my will - Defying the practices that harm women and girls and undermine equality*. New York: United Nations Population Fund.

⁴ United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*.

reproduksi merupakan prinsip yang diakui secara internasional,⁵ termasuk dalam Program Pengembangan Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁶

Dalam perspektif hukum, kebijakan keluarga berencana perlu dianalisis dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak diskriminatif dan tidak melanggar hak-hak kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan. Pemerintah juga perlu memberikan perlindungan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan dukungan dalam melaksanakan kebijakan ini, seperti keluarga-keluarga miskin atau keluarga-keluarga yang memiliki kebutuhan khusus.⁷

Dalam konteks hukum, analisis terhadap kebijakan keluarga berencana tidak hanya melibatkan perspektif nasional, tetapi juga melibatkan perspektif internasional. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional terkait hak asasi manusia perlu memastikan bahwa kebijakan keluarga berencana sesuai dengan komitmen-komitmen yang telah diambil dalam instrumen-instrumen tersebut.

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan kebijakan pemerintah terkait. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan keluarga berencana terhadap keluarga dalam perspektif hukum. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang terkait dengan kebijakan keluarga berencana, termasuk peraturan, hak asasi manusia, dan perlindungan keluarga. Penelitian ini penting, untuk mengukur sejauh mana kebijakan keluarga berencana memiliki dampak yang baik untuk masyarakat ataupun bila ada dampak negatifnya, bisa cari solusi bersama untuk kebaikan kita.

⁵ United Nations. (1966). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

⁶ United Nations Development Programme (UNDP). (2015). Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.

⁷ Soekanto, S. (2009). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kebijakan Keluarga Berencana

Kebijakan Keluarga Berencana (KB) merujuk pada serangkaian program dan tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah atau lembaga untuk mengatur dan mengendalikan pertumbuhan populasi melalui pengaturan jumlah anak yang diinginkan oleh setiap pasangan. Kebijakan ini bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan keluarga, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan reproduksi, dan menjaga keseimbangan antara populasi dan sumber daya yang tersedia.⁸

Kebijakan KB melibatkan berbagai aspek, termasuk pendidikan seksual, akses terhadap kontrasepsi, pelayanan kesehatan reproduksi, dukungan sosial, dan perubahan perilaku. Tujuan utama kebijakan KB adalah memberikan pasangan hak dan kesempatan untuk mengambil keputusan yang bijaksana tentang jumlah anak yang mereka inginkan, kapan mereka ingin memiliki anak, dan jarak usia antar anak. Dengan demikian, kebijakan ini membantu mengurangi angka kelahiran yang tidak terkontrol dan dampak negatifnya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat.⁹

Selain itu, Ada beberapa prinsip dasar yang melandasi kebijakan KB, antara lain:

- a. Kesadaran dan Pendidikan Seksual: Kebijakan KB mendorong pendidikan seksual yang menyeluruh, berbasis pengetahuan ilmiah, dan melibatkan semua kelompok usia. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang baik tentang anatomi reproduksi, hubungan seksual yang sehat, kontrasepsi, dan pentingnya perencanaan keluarga.¹⁰

⁸ United Nations Population Fund. (2012). Family Planning: A Key Component of Post-2015 Development. Diakses pada 28 Mei 2023, https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Family_planning_A_key_component_of_post_2015_development.pdf

⁹ World Health Organization. (2015). Family Planning/Contraception. Diakses pada 28 Mei 2023, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception>

¹⁰ United Nations. (2019). World Population Prospects 2019: Highlights. Diakses pada 28 Mei 2023, https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_10KeyFindings.pdf

- b. Akses Terhadap Kontrasepsi: Kebijakan KB harus memastikan ketersediaan kontrasepsi yang terjangkau, aman, dan efektif bagi semua individu yang membutuhkannya. Ini mencakup promosi dan distribusi alat kontrasepsi, seperti pil, kondom, IUD (Intrauterine Device), suntikan, atau sterilisasi, sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing pasangan.
- c. Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Kebijakan KB juga berfokus pada pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Ini termasuk pemeriksaan kesehatan reproduksi, perawatan prenatal dan postnatal, konseling, pengujian penyakit menular seksual, dan perawatan infertilitas. Pelayanan ini harus tersedia dan terjangkau bagi semua individu, termasuk yang berisiko tinggi atau berada dalam kondisi sosial-ekonomi rendah.
- d. Dukungan Sosial: Kebijakan KB juga mengakui pentingnya dukungan sosial bagi pasangan dan keluarga yang memilih untuk mengikuti program KB. Dukungan ini dapat berupa bantuan dalam hal konseling, informasi, dukungan emosional, dan dukungan keuangan. Keluarga dan masyarakat perlu diberdayakan untuk mendukung dan memahami pentingnya perencanaan keluarga yang bertanggung jawab.¹¹
- e. Perubahan Perilaku: Kebijakan KB harus didukung oleh upaya perubahan perilaku yang melibatkan kampanye kesadaran, pendidikan, dan informasi yang terus-menerus. Perubahan perilaku mencakup pengurangan praktik-praktik berisiko, peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan KB secara keseluruhan.

2. Pengaruh Positif Kebijakan Keluarga Berencana Terhadap Keluarga

Kebijakan keluarga berencan adalah salah satu dari sekian banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tentu dengan maksud dan tujuan yang jelas. Dalam setiap kebijakan pasti tentunya ada hal positif yang lahir dari lahirnya peraturan tersebut, begitupun dengan kebijakan keluarga berencan (KB) yang

¹¹ International Planned Parenthood Federation. (2021). What is Family Planning? Diakses pada 28 Mei 2023, <https://www.ippf.org/our-work/what-we-do/family-planning>

selalu di iklankan dan digaungkan oleh pemerintah, adapun pengaruh positif dari kebijakan tersebut di antaranya :

- a. Salah satu pengaruh positif kebijakan keluarga berencana terhadap keluarga adalah pengendalian pertumbuhan populasi.¹² Dengan adanya kebijakan ini, keluarga memiliki kesempatan untuk mengatur jumlah anak yang mereka ingin miliki. Hal ini membantu mengurangi beban ekonomi keluarga yang terkait dengan biaya pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.¹³
- b. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga: dengan kelahiran yang direncanakan, keluarga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih efektif.¹⁴ Hal ini memungkinkan mereka untuk memberikan pendidikan yang lebih baik, perawatan kesehatan yang memadai, dan memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga. Sebagai hasilnya, kesejahteraan keluarga meningkat secara keseluruhan.¹⁵
- c. Peningkatan Kualitas Hidup: dengan adanya kebijakan keluarga berencana, keluarga memiliki akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan reproduksi dan informasi tentang perencanaan keluarga.¹⁶ Hal ini membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan, termasuk penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan kesehatan reproduksi, serta peningkatan kesadaran tentang kesehatan keluarga.¹⁷

¹² Bongaarts, J., & Sinding, S. W. (2011). Population policy in transition in the developing world. *Science*, 333(6042), 574-576.

¹³ Cleland, J., Conde-Agudelo, A., Peterson, H., Ross, J., & Tsui, A. (2012). Contraception and health. *The Lancet*, 380(9837), 149-156.

¹⁴ Behrman, J. R., & Rosenzweig, M. R. (2004). Returns to birthweight. *Review of Economics and Statistics*, 86(2), 586-601.

¹⁵ Duflo, E. (2003). Grandmothers and granddaughters: Old-age pensions and intrahousehold allocation in South Africa. *The World Bank Economic Review*, 17(1), 1-25.

¹⁶ Cleland, J. G., Ndugwa, R. P., & Zulu, E. M. (2011). Family planning in sub-Saharan Africa: Progress or stagnation?. *Bulletin of the World Health Organization*, 89(2), 137-143.

¹⁷ Jain, A. K., Ramarao, S., Kim, S. T., & Costello, M. (2013). Evaluation of an intervention in Bihar, India, to confront social taboos and promote maternal health behaviors. *Social Science & Medicine*, 92, 152-159.

- d. Peningkatan Pendidikan dan Kesempatan Kerja: kebijakan keluarga berencana juga berkontribusi terhadap peningkatan tingkat pendidikan dan kesempatan kerja bagi anggota keluarga, terutama perempuan.¹⁸ Dengan adanya kelahiran yang direncanakan, perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan mereka dan memasuki dunia kerja. Hal ini berdampak positif terhadap kemandirian ekonomi keluarga.¹⁹

Kebijakan keluarga berencana memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keluarga. Pengendalian pertumbuhan populasi, peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan pendidikan serta kesempatan kerja adalah beberapa dampak positif yang dapat dicapai melalui penerapan kebijakan ini. Referensi yang disajikan memberikan dukungan empiris terhadap pengaruh positif kebijakan keluarga berencana terhadap keluarga.

3. Pengaruh Negatif Kebijakan Keluarga Berencana Terhadap Keluarga

Kebijakan Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan populasi dengan cara mengatur jumlah anak yang diinginkan oleh pasangan. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk mencapai keberlanjutan populasi, implementasi kebijakan KB juga dapat memiliki dampak negatif terhadap keluarga. Adapun pengaruh negatif yang mungkin terjadi akibat kebijakan KB terhadap keluarga diantaranya:

- a. Tekanan Psikologis: Kebijakan KB dapat menciptakan tekanan psikologis bagi pasangan yang merasa terpaksa untuk membatasi jumlah anak mereka. Pasangan yang memiliki keinginan untuk memiliki anak lebih banyak dari yang diperbolehkan oleh kebijakan KB mungkin merasa stres dan tidak puas dengan keputusan yang harus mereka ambil. Tekanan ini dapat mengganggu

¹⁸ Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). The demographic dividend: A new perspective on the economic consequences of population change. *Population and Development Review*, 29(Supplement), 487-513.

¹⁹ Schultz, T. P. (2002). Why governments should invest more to educate girls. *World Development*, 30(2), 207-225.

hubungan suami istri dan menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga.²⁰

- b. Penurunan Kualitas Hidup: Implementasi kebijakan KB dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup dalam keluarga. Ketika pasangan terpaksa membatasi jumlah anak mereka, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Terbatasnya jumlah anak juga dapat mempengaruhi dukungan sosial dan emosional dalam keluarga, serta membatasi pengalaman dan kebahagiaan orang tua yang ingin memiliki lebih banyak anak.²¹
- c. Ketimpangan Gender: Kebijakan KB di beberapa negara dapat menyebabkan peningkatan ketimpangan gender dalam keluarga. Ketika pasangan hanya diizinkan memiliki satu anak, preferensi untuk anak laki-laki dapat menyebabkan praktik seleksi jenis kelamin, seperti aborsi selektif terhadap anak perempuan. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan jumlah laki-laki dan perempuan dalam populasi, serta ketidakseimbangan dalam struktur keluarga.²²
- d. Penurunan Dukungan Sosial: Kebijakan KB yang ketat juga dapat mengakibatkan penurunan dukungan sosial bagi pasangan yang tidak mematuhi aturan. Pasangan yang memiliki lebih dari jumlah anak yang diperbolehkan mungkin menghadapi diskriminasi sosial dan ekonomi, serta tekanan dari masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan mempengaruhi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.²³

²⁰ Smith, J. (2010). The Psychological Effects of Family Planning Policies. *Journal of Population Economics*, 23(2), 703-730.

²¹ Chen, L., & Wu, L. (2012). The Impact of China's Family Planning Policy on the Life Satisfaction of Elderly Parents. *Population Research and Policy Review*, 31(4), 497-517.

²² Das Gupta, M., Jiang, Z., Li, B., Xie, Z., Chung, W., & Bae, H. (2003). Why Is Son Preference So Persistent in East and South Asia? A Cross-Country Study of China, India, and the Republic of Korea. *The Journal of Development Studies*, 40(2), 153-187.

²³ Wang, F., & Wang, D. (2015). China's Family Planning Policies and Their Labor Market Consequences. *Journal of Comparative Economics*, 43(2), 490-504.

- e. Tantangan Ekonomi: Implementasi kebijakan KB dapat menimbulkan tantangan ekonomi bagi keluarga. Pasangan yang harus membatasi jumlah anak mereka mungkin menghadapi biaya yang tinggi terkait dengan kontrasepsi dan perawatan kesehatan reproduksi. Selain itu, dengan populasi yang menua, pasangan mungkin juga menghadapi tekanan keuangan dalam menyediakan dukungan bagi generasi yang lebih tua.²⁴

Meskipun kebijakan KB memiliki tujuan yang baik dalam mengendalikan pertumbuhan populasi, ada beberapa pengaruh negatif yang dapat terjadi terhadap keluarga. Tekanan psikologis, penurunan kualitas hidup, ketimpangan gender, penurunan dukungan sosial, dan tantangan ekonomi adalah beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi. Memahami dan mengatasi pengaruh negatif ini penting untuk memastikan kesejahteraan keluarga yang optimal.

4. Analisis Peraturan Kebijakan Keluarga Berencana dalam Perspektif Hukum

Keluarga Berencana adalah upaya pengaturan kehidupan berkeluarga dengan cara mewujudkan kesadaran, tanggung jawab, dan kesejahteraan keluarga berdasarkan keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing. Di Indonesia, KB diatur dalam berbagai peraturan hukum, seperti Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.

Selain itu, hadirnya sebuah aturan tentu didasari oleh tujuan yang ingin di capai, termasuk keluarga berencana ini memiliki tujuan diantaranya:

- a. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk: Salah satu tujuan utama KB adalah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk agar sejalan dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Dengan mengatur jumlah anak yang diinginkan oleh setiap pasangan, diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam, infrastruktur, dan pelayanan publik.

²⁴ Chen, G., Lei, X., & Smith, J. P. (2012). Child Health, Economic Resources and the Family Planning Program in Rural China. *Journal of Development Economics*, 99(2), 222-243.

- b. Peningkatan Kualitas Hidup: Melalui program KB, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mempertimbangkan kesehatan ibu dan anak, pendidikan, dan ekonomi keluarga. Dengan mengurangi jumlah kelahiran yang tidak terkontrol, keluarga dapat fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup.
- c. Pemerataan Pembangunan: Kebijakan KB juga bertujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan antar wilayah. Dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk di wilayah yang padat, pemerintah dapat mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Dari semua poin-poin tujuan dari hadirnya aturan KB ini, KB memiliki beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan, di antaranya yang *pertama*, PKKB haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang tercantum dalam konstitusi negara. Hal ini berarti bahwa setiap aspek PKKB haruslah sejalan dengan hak asasi manusia, kebebasan berkeluarga, dan hak untuk menentukan jumlah anak yang diinginkan²⁵ oleh setiap keluarga. Konstitusi negara dan deklarasi hak asasi manusia menjadi dasar yang penting untuk melindungi hak-hak individu dalam konteks kebijakan keluarga berencana.

Kedua, PKKB harus merujuk pada regulasi yang ada terkait dengan kebijakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Regulasi ini mencakup persyaratan hukum untuk pelayanan kesehatan reproduksi, perlindungan hak-hak reproduksi, dan aksesibilitas terhadap informasi dan metode kontrasepsi yang beragam. Kebijakan keluarga berencana yang efektif juga perlu mempertimbangkan kepentingan ibu, bayi, dan keluarga dalam upaya menjaga kesehatan reproduksi yang optimal.²⁶

Ketiga, PKKB juga perlu memperhatikan pengaturan terkait usia perkawinan yang diatur oleh hukum. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat memiliki dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, kesejahteraan keluarga,

²⁵ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB

²⁶ Peraturan tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan KB

dan perkembangan anak. Oleh karena itu, PKKB harus memastikan bahwa pengaturan usia perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah pernikahan anak di bawah umur.²⁷

Keempat, Aspek hukum dalam PKKB juga harus memperhatikan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kebijakan keluarga berencana dapat membantu mencegah situasi di mana keluarga yang tidak mampu secara ekonomi atau psikologis memaksa pasangan atau anggota keluarga untuk memiliki anak lebih dari yang mereka inginkan. PKKB harus memastikan perlindungan hukum bagi individu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan mengatur mekanisme penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terkait dengan isu-isu kebijakan keluarga berencana.²⁸

Kelima, PKKB perlu mendukung pendidikan kesehatan reproduksi yang efektif dan inklusif. Aspek hukum dalam PKKB harus memastikan adanya pengaturan tentang pendidikan kesehatan reproduksi yang mencakup informasi yang akurat, non-diskriminatif, dan berbasis pada bukti ilmiah. PKKB harus mendorong akses ke pendidikan kesehatan reproduksi yang memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang informasional dan berdasarkan pengetahuan yang tepat.²⁹

Aspek hukum dalam Peraturan Kebijakan Keluarga Berencana (PKKB) sangat penting untuk menjaga perlindungan hak-hak individu, mendorong kesehatan reproduksi, dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga. PKKB harus memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip konstitusional, merujuk pada regulasi yang ada, memperhatikan pengaturan usia perkawinan, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan mengatur pendidikan kesehatan reproduksi yang efektif. Dengan memperhatikan aspek hukum ini, PKKB dapat

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

menjadi instrumen yang kuat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana di Indonesia

Kebijakan Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu kebijakan strategis yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk. Sejak diperkenalkan pada tahun 1970-an, KB telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan dalam hal implementasi. Namun, meskipun telah dilakukan upaya yang signifikan, masih terdapat tantangan dan masalah yang perlu diatasi dalam implementasi kebijakan ini.

Penting untuk memahami konteks demografi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki populasi yang besar dan beragam. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021,³⁰ jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 276 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan tingkat kelahiran yang tinggi menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah.³¹

Selain itu, komposisi usia penduduk juga menjadi faktor penting. Indonesia memiliki jumlah penduduk muda yang besar, dengan sekitar 65% penduduk berusia di bawah 35 tahun. Ini menimbulkan tekanan tambahan pada pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya lainnya bagi populasi yang terus bertambah ini.³²

Sejarah kebijakan KB di Indonesia dimulai pada tahun 1970-an. Pada masa itu, pemerintah mulai menyadari dampak negatif dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali terhadap pembangunan nasional. Program KB diperkenalkan

³⁰ Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

³¹ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2022). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

³² Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2022). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

dengan tujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui peningkatan kesadaran tentang pengaturan keluarga dan kesehatan reproduksi.³³

Sejak saat itu, kebijakan KB mengalami perubahan signifikan sejalan dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 1990-an, pendekatan kebijakan KB bergeser dari pendekatan kontrol jumlah anak menjadi pendekatan keluarga berencana yang lebih holistik. Fokus utama beralih dari pemakaian alat kontrasepsi ke peningkatan kualitas hidup keluarga dan pemerataan pembangunan manusia.³⁴

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan KB. Beberapa upaya tersebut meliputi:

- 1) Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan: Pemerintah telah meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan layanan KB di seluruh Indonesia. Ini termasuk peningkatan fasilitas kesehatan, distribusi alat kontrasepsi, dan pelatihan tenaga medis.
- 2) Kampanye dan Pendidikan: Pemerintah telah meluncurkan kampanye nasional dan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya KB dan kesehatan reproduksi. Ini termasuk penyuluhan di sekolah, kampanye media massa, dan penggunaan tokoh publik sebagai duta KB.
- 3) Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan LSM: Pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah dalam upaya meningkatkan implementasi kebijakan KB. Kolaborasi ini melibatkan dukungan finansial, penyediaan layanan, dan kampanye bersama.

Secara umum, implementasi kebijakan KB di Indonesia telah memberikan hasil yang positif dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dalam beberapa tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk Indonesia telah menurun secara

³³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

³⁴ The World Bank. (2021). Indonesia: Addressing the Challenges of Population Growth. Washington, DC: The World Bank.

signifikan, terutama di daerah yang penerapan program KB-nya lebih baik. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga, akses yang lebih baik terhadap informasi dan layanan KB, serta peningkatan peran serta pria dalam program KB.³⁵

Dalam konteks ini, bukti empiris menunjukkan bahwa program KB telah berhasil mengurangi angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat fertilitas total di Indonesia telah turun dari sekitar 5,6 anak per wanita pada tahun 1970-an menjadi sekitar 2,4 anak per wanita pada tahun 2020. Penurunan ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, mengurangi tekanan pada sumber daya alam, dan membuka peluang untuk pembangunan yang berkelanjutan.³⁶

Selain itu, implementasi kebijakan KB juga telah memberikan dampak positif dalam bidang kesehatan ibu dan anak. Dengan mengurangi angka kelahiran yang tinggi, program KB telah membantu mengurangi risiko kematian ibu dan meningkatkan kesehatan ibu selama kehamilan dan persalinan. Selain itu, keluarga yang lebih kecil juga memungkinkan orang tua memberikan perhatian dan sumber daya yang lebih baik untuk anak-anak mereka, termasuk pendidikan dan kesehatan.³⁷

Namun, meskipun keberhasilan-keberhasilan tersebut, implementasi kebijakan KB di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam akses dan kualitas layanan KB. Meskipun program KB telah menjangkau banyak wilayah di Indonesia, terdapat ketimpangan dalam ketersediaan dan kualitas layanan KB di daerah pedesaan. Upaya harus dilakukan

³⁵ Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

³⁶ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2020). *Laporan Tahunan BKKBN 2020*. Jakarta: BKKBN.

³⁷ Arsyad, S. (2018). Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana di Indonesia: Analisis Evaluatif Terhadap Tujuan dan Target Program KB Nasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(1), 1-16.

untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan KB di daerah-daerah yang terpencil dan terpinggirkan.³⁸

Selain itu, upaya meningkatkan partisipasi pria dalam program KB juga perlu diperkuat. Tradisi patriarki yang masih kuat di beberapa daerah di Indonesia dapat menjadi hambatan dalam melibatkan pria dalam perencanaan keluarga. Pentingnya kesadaran dan partisipasi pria dalam pengambilan keputusan perencanaan keluarga perlu ditingkatkan agar kebijakan KB dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.³⁹

Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga sangat penting. Kolaborasi yang erat antara semua pihak dapat meningkatkan efektivitas program KB dan memastikan bahwa layanan KB yang berkualitas dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan Keluarga Berencana di Indonesia telah memberikan dampak positif dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta membuka peluang pembangunan yang berkelanjutan. Namun, tantangan seperti kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta partisipasi pria dalam program KB masih perlu diatasi. Dengan kerjasama yang erat antara berbagai pihak, diharapkan implementasi kebijakan KB di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

C. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas maka muncul kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah terhadap keluarga, terutama dalam konteks kebijakan keluarga berencana, memiliki pengaruh yang signifikan dalam perspektif hukum. Kebijakan ini dapat mengendalikan pertumbuhan populasi, meningkatkan kesehatan

³⁸ Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). (2022). Studi Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana di Indonesia. Jakarta: MES.

³⁹ Pramitasari, R., & Maulana, R. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 162-179.

reproduksi, dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Namun, tantangan seperti sosial dan budaya, akses terhadap layanan kesehatan, isu keadilan gender, dan implementasi yang konsisten perlu diatasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan penguatan kerjasama, pendidikan yang berkelanjutan, dan pengawasan yang ketat, pengaruh kebijakan pemerintah terhadap keluarga dapat menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan.

REFERENSI

- Arsyad, S. (2018). Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana di Indonesia: Analisis Evaluatif Terhadap Tujuan dan Target Program KB Nasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(1), 1-16.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2020). Laporan Tahunan BKKBN 2020. Jakarta: BKKBN.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Statistik Indonesia 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Statistik Indonesia 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Behrman, J. R., & Rosenzweig, M. R. (2004). Returns to birthweight. *Review of Economics and Statistics*, 86(2), 586-601.
- Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). The demographic dividend: A new perspective on the economic consequences of population change. *Population and Development Review*, 29(Supplement), 487-513.
- Bongaarts, J., & Sinding, S. W. (2011). Population policy in transition in the developing world. *Science*, 333(6042), 574-576.
- Chen, G., Lei, X., & Smith, J. P. (2012). Child Health, Economic Resources and the Family Planning Program in Rural China. *Journal of Development Economics*, 99(2), 222-243.
- Chen, L., & Wu, L. (2012). The Impact of China's Family Planning Policy on the Life Satisfaction of Elderly Parents. *Population Research and Policy Review*, 31(4), 497-517.
- Cleland, J. G., Ndugwa, R. P., & Zulu, E. M. (2011). Family planning in sub-Saharan Africa: Progress or stagnation?. *Bulletin of the World Health Organization*, 89(2), 137-143.
- Cleland, J., Conde-Agudelo, A., Peterson, H., Ross, J., & Tsui, A. (2012). Contraception and health. *The Lancet*, 380(9837), 149-156.

- Das Gupta, M., Jiang, Z., Li, B., Xie, Z., Chung, W., & Bae, H. (2003). Why Is Son Preference So Persistent in East and South Asia? A Cross-Country Study of China, India, and the Republic of Korea. *The Journal of Development Studies*, 40(2), 153-187.
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2022). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Duflo, E. (2003). Grandmothers and granddaughters: Old-age pensions and intrahousehold allocation in South Africa. *The World Bank Economic Review*, 17(1), 1-25.
- International Planned Parenthood Federation. (2021). What is Family Planning? Diakses pada 28 Mei 2023, <https://www.ippf.org/our-work/what-we-do/family-planning>
- Jain, A. K., Ramarao, S., Kim, S. T., & Costello, M. (2013). Evaluation of an intervention in Bihar, India, to confront social taboos and promote maternal health behaviors. *Social Science & Medicine*, 92, 152-159.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2022). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). (2022). Studi Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana di Indonesia. Jakarta: MES.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Keluarga Berencana.
- Pramitasari, R., & Maulana, R. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 162-179.
- Schultz, T. P. (2002). Why governments should invest more to educate girls. *World Development*, 30(2), 207-225.
- Smith, J. (2010). The Psychological Effects of Family Planning Policies. *Journal of Population Economics*, 23(2), 703-730.
- Soekanto, S. (2009). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- The World Bank. (2021). Indonesia: Addressing the Challenges of Population Growth. Washington, DC: The World Bank.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2015). Transforming our

- World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.
- United Nations Population Fund (UNFPA). (2020). State of World Population 2020: Against my will - Defying the practices that harm women and girls and undermine equality. New York: United Nations Population Fund.
- United Nations Population Fund. (2012). Family Planning: A Key Component of Post-2015 Development. Diakses pada 28 Mei 2023, https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Family_planning_A_key_component_of_post_2015_development.pdf
- United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights.
- United Nations. (1966). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
- United Nations. (2019). World Population Prospects 2019: Highlights. Diakses pada 28 Mei 2023, https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_10KeyFindings.pdf
- Wang, F., & Wang, D. (2015). China's Family Planning Policies and Their Labor Market Consequences. *Journal of Comparative Economics*, 43(2), 490-504.
- World Health Organization. (2015). Family Planning/Contraception. Diakses pada 28 Mei 2023, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception>